

## **Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)**

**Khaerunnisa Tri Darmaningrum**

IAIN Pekalongan

[khaerunnisa.tri.darmaningrum@iainpekalongan.ac.id](mailto:khaerunnisa.tri.darmaningrum@iainpekalongan.ac.id)

### **Abstract**

This research aims to describe and analyze the efforts made by the Coastal Community Empowerment Program in the Batang Regency, Central Java. The benefit of doing this research is that it can be seen that the Coastal Community Empowerment Program seeks to alleviate poverty and prosper the people in Klidang Lor village, Batang Regency, Central Java. To obtain data from credible sources, this study uses a descriptive qualitative research approach with data source triangulation analysis techniques. To obtain data sources, it is done by means of observation, in-depth interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of P2MPP in Klidang Lor Village, Batang Regency has been quite helpful in elevating people's lives with the existence of 5 (five) P2MPP approaches.

**Keywords:** community development; social welfare; coastal communities; P2MPP

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di wilayah Kabupaten Batang Jawa Tengah. Manfaat dengan dilakukannya penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai ini berupaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa Klidang Lor Kabupaten Batang Jawa Tengah. Untuk memperoleh data dari sumber yang kredibel, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis triangulasi sumber data. Untuk memperoleh sumber data, dilakukan dengan cara observasi, In-depth interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa penerapan P2MPP di Desa Klidang Lor Kabupaten Batang telah cukup membantu mengangkat kehidupan masyarakat dengan adanya 5 (lima) pendekatan P2MPP.

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat; kesejahteraan sosial; masyarakat pesisir; P2MPP

## **Pendahuluan**

Pesisir merupakan daerah yang memiliki sumber daya melimpah. Sumber daya tersebut terutama yang berada di wilayah laut seperti segala jenis ikan, budidaya garam, dan usaha jasa yang bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sehingga, dengan hal tersebut, Indonesia memiliki potensi sangat besar pada wilayah laut dan pesisir. Tak salah jika Indonesia sering disebut negara maritim.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019, Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km. Kemudian jika dilihat dari luas perairan laut mencapai 5,8 juta km persegi. Luas tersebut jika dibandingkan dengan daratan mencapai 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia (Pregiwati, 2019). Melihat angka tersebut, sepertinya mustahil jika nelayan dan pekerja sekitar laut miskin, karena melimpahnya sumber daya laut.

Salah satu pantai yang memiliki potensi cukup tinggi terletak di pulau Jawa. Sehingga banyak orang pulau Jawa berprofesi sebagai nelayan maupun jasa lain di wilayah laut dan pesisir. Begitu juga di Provinsi Jawa Tengah, yang bedasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, ada 266.310 orang yang menjadi nelayan di Jawa Tengah. Jumlah tersebut salah satunya disebabkan panjang garis pantai di Jawa Tengah relatif panjang mencapai 741,49 km (DKP, 2013).

Pendefinisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari Kecamatan atau Kabupaten atau kota yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk Provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung

jawab (IPB, 2002).

Salah satu daerah pesisir yang banyak terdapat nelayan ada di Jawa Tengah, tepatnya Desa Klidang Lor, Kabupaten Batang. Desa Klidang lor adalah satu desa di Kecamatan Batang yang merupakan daerah pesisir pantai. Letak Desa Klidang Lor ini sangat dekat dengan pantai sehingga banyak orang yang menyebut desa pesisir. Sebagai wilayah yang dekat dengan kota jarak tidak begitu jauh dari pusat kota atau alun – alun Batang, Desa Klidang Lor ini merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya bernelayan dan berdagang kecil-kecilan, tidak hanya ikan saja yang dijual masyarakat Desa Klidang Lor melainkan semua seafood seperti udang, kerang, cumi-cumi, kepiting dan lain sebagainya.

Sebagian besar masyarakat Klidang Lor adalah bekerja di sektor kelautan. Pada dasarnya, selain hasil tangkapan laut, sebagai sumber ekonomi kelautan dan perairan juga menyediakan sektor perhubungan laut, sektor pariwisata bahari, sektor bangunan kelautan, sektor energi dan sumberdaya mineral kelautan, sektor industri kelautan, serta sektor jasa kelutuan (Sofyan, 2016). Beberapa sektor ini mendukung negara terutama dalam pemasukan. Dalam hal ini negara mendapatkan jaminan pemasukan dalam jumlah yang cukup besar.

Sektor bangunan kelautan misalkan berkaitan dengan infrastruktur yang berada di pantai atau pesisir. Bangunan di area ini pada hakekatnya mendukung serta menunjang kehidupan manusia. Negara sebagai pihak pencetus ide, memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat strategis karena dapat dilalui dengan mudah oleh tranportasi laut (Harahap, 2015). Potensi tersebut sebenarnya jika dapat dimaksimalkan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Namun pada faktanya mereka masih banyak menghadapi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan termasuk masyarakat Desa Klidang Lor, Batang.

Dengan melihat realitas tersebut, akhirnya salah satu program pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai (P2MPP). Program ini adalah tindak lanjut dari kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan yang merujuk Keputusan Menteri Periknan dan Kelautan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Pediman ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pesisir dan laut. Pengelolaan yang diatur berupaya

untuk mengelola sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan dengan integrasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (KKP, 2002).

Sebagai desa pesisir, Klidang Lor merupakan salah satu desa di kabupaten Batang yang mendapatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai (P2MPP). Program ini bermaksud sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui program pemberdayaan ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan penanggulangan kemiskinan secara professional dan berkelanjutan. Sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan pesisir dan pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan rumah tangga miskin maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai untuk mensejahterakan masyarakat sekitar (Utama, 2017).

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pesisir yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi yang dialami oleh masyarakat pesisir tersebut disebabkan oleh berbagai hal, yang diantaranya adalah kesulitan memperoleh pinjaman modal, masih terbatasnya mobilitas masyarakat pesisir, rusaknya sumberdaya laut, rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta masih rendahnya produktivitasnya dan daya saing usaha kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat suatu program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).

Salah satu desa yang menjadi sasaran program ini adalah di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. P2MPP telah dijalankan selama 5 tahun lebih dan menunjukkan beberapa permasalahan yang masih terjadi pada masyarakat di Desa Klidang lor, salah satunya adalah masih sedikitnya alternatif mata pencaharian masyarakat Desa Klidang lor. Desa ini merupakan salah satu wilayah pesisir pinggir pantai yang secara ekonominya masih kurang dan masyarakatnya masih banyak membutuhkan dampingan atau pemberdayaan khususnya bagi anak anak yang putus sekolah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui upaya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dan pantai dengan adanya

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) di wilayah Desa Klidang Lor Kabupaten Batang.

### **Metode Penelitian**

Peneliti akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006). Hal ini dilakukan karena untuk melihat upaya dari penerapan suatu program. Penelitian ini mengamati bagaimana proses implementasi P2MPP dan upaya dari program tersebut untuk mensejahterakan masyarakat desa Klidang Lor Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini ditemukan sebuah fenomena mengenai aktifitas UPKu pada desa Klidang Lor. Akses yang mudah dan dekat dengan alun-alun Batang menjadi alasan pemilihan lokasi di desa Klidang Lor Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan *teoritical sampling* dalam menentukan informan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap studi analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Informan primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Klidang Lor dan Ketua UPKu, sedangkan untuk informan sekunder maka digunakan informasi dari sesepuh warga desa Klidang Lor Kabupaten Batang, dan beberapa warga yang tergolong dalam rumah tangga miskin (RTM). Berdasarkan pemetaan informan tersebut, maka teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh, maka digunakan teknik analisis data dengan langkah sebagai berikut 1) Pengumpulan data mentah, 2) Transkrip Data, 3) Pembuatan Koding, 4) Kategorisasi data, 5) penyimpulan sementara, 6) Triangulasi dan 7) Penyimpulan akhir. Sebagaimana dalam dari semua data yang terkumpul peneliti melakukan analisis data dengan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori (Moleong, 2006). Dikarenanya keterbatasan waktu dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber.

## Hasil dan Pembahasan

### Desa Klidang Lor Sebagai Wilayah Pesisir

Secara geografis, Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan, sebelah selatan dengan Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara, sebelah timur dengan Kab. Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kabupaten Batang terbagi menjadi 15 kecamatan. Luas wilayah Kab. Batang tercatat 78.864,16 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 22.373,68 Ha (28,37 %) lahan sawah dan 56.490,48 Ha (71,63%) lahan bukan lahan sawah (<http://tataruang.pusdataru.jatengprov.go.id>).

Pembagian administrasi perkecamatan di kabupaten Batang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Pembagian Administrasi Per Kecamatan di Kabupaten Batang

No.	Kecamatan	Desa	Dukuh	RT	RW
1.	Wonotunggal	15	71	197	61
2.	Bandar	17	79	351	71
3.	Blado	18	74	234	68
4.	Reban	19	67	248	68
5.	Bawang	20	88	354	104
6.	Tersono	20	79	263	73
7.	Gringsing	15	89	313	83
8.	Limpung	17	80	233	70
9.	Banyuputih	11	49	175	47
10.	Subah	17	68	287	72
11.	Pecalungan	10	56	182	54
12.	Tulis	17	52	173	52
13.	Kandeman	13	62	231	59
14.	Batang	21	114	493	111
15.	Warungasem	18	68	221	73

Sumber: Tata Ruang Pusdaru Jateng

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang

merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis (<https://www.batangkab.go.id>). Sebagai bagian dari wilayah utara kabupaten Batang, Desa Klidang yang terletak di kecamatan Batang Kabupaten Batang ini menjadi salah satu sentra perikanan dikarenakan lokasinya yang sangat dekat dengan pantai.

Salah satu indikator sebuah daerah dikatakan sebagai wilayah pesisir adalah memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat ini digunakan untuk melakukan jual beli hasil tangkapan para nelayan. Jika di Kabupaten Batang, nelayan yang sudah berlayar selama kurang lebih sebulan kemudian kembali dan berhenti di TPI. Mereka mengeluarkan seluruh tangkapan ikan yang jumlahnya bisa mencapai ton. Masyarakat Desa Klidang Lor termasuk yang juga menghasilkan hasil tangkapan tersebut sekaligus sebagai lokasi TPI. Berikut data TPI di Jawa Tengah.

Tabel 2. Jumlah TPI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Regency/City</b>			
Kab. Cilacap	11	11	9
Kab. Kebumen	8	8	8
Kab. Purworejo	-	-	3
Kab. Rembang	12	11	10
Kab. Pati	7	8	8
Kab. Jepara	11	11	12
Kab. Demak	2	2	2
Kab. Kendal	5	5	5
Kab. Batang	4	4	4
Kab. Pekalongan	2	2	2
Kab. Pemalang	5	5	5
Kab. Tegal	3	1	2
Kab. Brebes	8	8	6
Kota Semarang	1	1	1
Kota Pekalongan	1	1	1
Kota Tegal	3	3	3
<b>Jumlah/Total</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Data tersebut sudah cukup lama. Ada kemungkinan perubahan

jumlah TPI di setiap kabupaten, meskipun tidak terlalu banyak. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah TPI di Jawa Tengah. sejak tahun 2011 sampai 2013 Kabupaten Batang memiliki 4 TPI. Sarana dan prasarana perikanan dan kelautan khususnya dalam aktivitas penangkapan dan perdagangan ikan dapat dikatakan memadai. Berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, TPI tersebut diantaranya TPI yakni TPI Klidang Lor, TPI Roban, TPI Celong dan TPI Siklayu. Kawasan pusat aktivitas perikanan di Batang mulai dari pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sentra usaha olahan ikan, serta perdagangan ikan terletak di Desa Klidang Lor. Karena letaknya yang demikian membuat sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan laut untuk mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Batang, jumlah nelayan di Kabupaten Batang sebanyak 10.331 orang. Jumlah tersebut terbanyak ada di Kecamatan Batang yang terbagi dalam beberapa desa yang merupakan daerah pesisir seperti Desa Klidang Lor, Klidang Wetan, Karangasem Utara, Karangasem Timur, Denasri Lor dan Denasri Wetan.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Mubyarto, 1984; Imron, 2001; Masyhuri, 1999; Kusnadi, 2002) jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin. Penggolongan nelayan atau masyarakat pesisir ke dalam kelas bawah/miskin belum mampu menjadi tolak ukur untuk analisis dan satu-satunya perspektif (Sofyan, 2016). Namun, tingkat kesejahteraan nelayan semakin merosot jika dibandingkan masa-masa tahun 1970an (Kusnadi, 2008). Nelayan dengan segala kondisinya merupakan sebuah mata pencaharian yang tidak perlu menanam seperti petani. Mereka cukup pergi ke laut untuk mengambil sumber daya yang telah tersedia.

Dengan kondisi geografis di pesisir, masyarakat Desa Klidang Lor yang merupakan masyarakat pesisir profesi yang dominan adalah nelayan. Berikut tabel mata pencaharian penduduk Desa Klidang Lor



Tabel 3. Data Mata pencaharian penduduk Desa Klidang Lor

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	16
Buruh Tani	15
Nelayan	1831
Pengusaha	93
Buruh Industri	156
Buruh bangunan	14
Buruh angkutan	1
Pedagang	197
PNS/ABRI/POLRI	24
Pensiunan	2
Lainnya	502
<b>Total</b>	<b>2996</b>

Sumber: Data Demografi Desa Klidang Lor tahun 2017

Dari tabel diatas jelas bahwa penduduk Desa Klidang Lor sebagian besar bermata pencaharian nelayan. Nelayan disini tidak hanya sebagai anak buah kapal (ABK), namun juga ada juragan pemilik kapal dan yang bekerja di kapal (juru mudi dll) serta pekerja galangan kapal. Bahkan jika diperjelas secara rinci akan lebih banyak. Tukang payang, buruh perbaikan kapal, dan tukang gas juga berkecimpung dengan kapal.

Dominasi nelayan atas pekerjaan yang lainnya ini memang karena kondisi geografis desa. Posisi pengusaha pun sebagian besar adalah pengusaha pendukung dan “sahabatnya”nelayan. Pengusaha tambang, pengusaha ikan asin, pengusaha sosis dan pengusaha pur ikan merupakan sebagian besar pengusaha yang ada. Urutan tiga terbesar jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah pedagang. Terlepas dari nelayan dan pengusaha, pedagang merupakan jalur alternatif masyarakat pesisir demi pencapaian tujuan ekonomi. Pedagang pun masih seputar dunia perikanan. Meskipun beberapa orang sebagai penjual sembako atau pedagang warung, namun pedagang ikan memiliki prosentase lebih tinggi (Sofyan,

2016).

Merujuk beberapa studi tentang nelayan yang miskin dan kaya, jika melihat nelayan yang ada di Desa Klidang Lor, tidak semua menjadi nelayan kaya. Nelayan buruh disini mungkin karena secara penghasilan masih di bawah rata-rata. Ditambah dengan gaya hidup nelayan yang kurang hemat, mereka semakin berada di lapisan sosial terbawah. Berbeda dengan nelayan *cantrang* khususnya di Batang, nelayan buruh memiliki penghasilan lebih tinggi dari UMP (Upah Minimum Provinsi). Pada tahun 2020, UMP Jawa Tengah adalah Rp. 1.798.979,00. Sedangkan rata-rata pendapatan nelayan di sini mencapai 2 juta per bulan. Sebenarnya dengan pendapatan sebanyak itu jika mereka mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, maka tidak akan menjadi nelayan miskin. Dengan gaya hidup yang cenderung boros, akhirnya banyak dari nelayan terlilit hutang dan saat *bayaran* mereka terpaksa menggunakannya untuk membayar hutang. Pendapatan tersebut berasal dari hasil tangkapan para nelayan.

Gambar 1. Infografis Perikanan November 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang 2021

Data tersebut merupakan hasil tangkapan pada bulan November 2021 saja. Artinya dalam satu bulan saja telah menghasilkan 72.079 kg segala jenis ikan, cumi-cumi dan sotong. Angka itu didapatkan dari TPI Klidang Lor. Jika dikonversi dengan harga yang berlaku saat itu, dapat menghasilkan angka sekitar lebih dari 1 milyar rupiah. Secara sederhana bagi masyarakat pesisir Batang termasuk nelayan Klidang Lor bukan merupakan masyarakat miskin.

Sekali lagi, realitas tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi

yang terlihat. Nelayan di Klidang Lor secara sekilas memang bukan kelompok masyarakat miskin, tapi bukan juga masyarakat kelas atas. Jika diamati lebih mendalam mereka juga memiliki hutang dan tanggungan yang cukup banyak. Dengan pendapatan yang dijelaskan sebelumnya, menurut mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan. Hal ini akan lebih dirasakan bagi ABK dan buruh lain pada usaha perikanan.

Kondisi ini sangat membutuhkan pendetakan dan pendampingan sosial. Paling tidak, ada sebuah program yang dapat memberikan perubahan atau minimal ada pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadikan mereka lebih mandiri. Sehingga sebuah program akhirnya dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).

### **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Desa Klidang Lor**

Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai. Namun dibalik kekayaan potensi sumberdaya alam tersebut wilayah pesisir dan pantai mempunyai beragam permasalahan yang mendasar yaitu sumberdaya manusianya masih marginal terutama dibidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian di salah satu wilayah di Jawa Timur bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir mayoritas masih tamat SD (sekitar 45 %), yang tidak tamat SD bisa mencapai 15 %, Bekerja di sektor nelayan dan pertanian 35 %, dan pengangguran mencapai 15 %. Bagi yang berpendidikan setingkat SMP mereka banyak yang memilih menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI) sebagai pilihan hidupnya untuk berjuang keluar dari kemiskinannya. Sementara pekerjaan di sektor perikanan dan pertanian merupakan pekerjaan musiman, dan mereka sebagian berperan sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang pendapatannya cukup minim (Diposaptono, 2003).

Apabila dibandingkan antara potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah pesisir dan pantai sangatlah tidak seimbang, seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera bila dibandingkan dengan fakta yang ada sekarang ini. Di wilayah pesisir banyak kantong-kantong kemiskinan, dan kesejahteraannya tidak merata dikarenakan banyak faktor yang harus diselesaikan, salah satunya adalah

keberdayaan masyarakatnya yang masih minim apabila dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

Desa Klidang Lor Kabupaten Batang yang mendapatkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program ini memang tidak jauh berbeda dengan program lainnya, terutama dalam segi pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan dan sosialisasi, serta tahap pengelolaan dana P2MPP. Pelaksanaan P2MPP ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bertugas dalam pelaksanaannya. Dari data yang didapat tugas-tugas dari pihak yang berwenang sudah jelas, hal ini mempermudah jalannya pelaksanaan program karena adanya kejelasan tugas dan wewenang tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penelitian ini adalah membuat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (P2MPP) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam membuat program juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah program tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi target sasaran. Hal tersebut bertujuan agar suatu program tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Jadi dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi program akan selalu berkaitan dengan tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan seperti yang diterapkan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (P2MPP) yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat pesisir yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Kegiatan sosialisasi P2MPP dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Selain itu upaya sosialisasi juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya program secara lancar dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat berkelanjutan

Pengendalian P2MPP dilakukan melalui kegiatan tahap pelaksanaan yang meliputi pihak-pihak terkait dan proses pelaksanaan kegiatan dalam P2MPP serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan program P2MPP. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan program P2MPP ini bertujuan untuk menjaga setiap proses setiap proses pelaksanaannya program tersebut agar sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan P2MPP serta mengendalikan agar setiap pelaku dan sasaran dari program P2MPP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam konsep ini yang menjadi pelaku utamanya adalah pihak- pihak terkait dalam program P2MPP yang berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pembina agar tujuan dan mekanisme program P2MPP dapat terealisasi dengan baik dan benar serta masyarakat pesisir yang menjadi sasaran program, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai terciptanya masyarakat pesisir yang mandiri, lebih modern, serta dapat memanfaatkan SDA dan SDM secara lebih maksimal.

Secara normatif P2MPP memiliki beberapa tahapan: (1) Tahap persiapan UPKu (Unit Pengelola Keuangan) yang dimulai pada penguatan kapasitas kelembagaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan UPKu dapat berfungsi optimal. (2) Sosialisasi oleh UPKu yaitu dengan memperkenalkan pengurus UPKu dan pengawas program P2MPP. Setelah itu dilakukan kemudian ada proses pembentukan pokmas-pokmas selaku penerima bantuan pinjaman dana. (3) Kemudian ada proses pengelolaan dana yang terdiri dari tahap pengaluran dana dan pengelolaan unit simpan pinjam (USP) (Utama, 2017). Proses dan tahapan ini juga dilakukan di Desa Klidang Lor, di mana telah ditentukan ketua serta seluruh pengelola UPKu dalam P2MPP. Mereka telah melakukan persiapan untuk menguatkan lembaga. Secara teknis mereka membentuk kelompok yang diawali dengan diskusi kelompok. Setelah pengurus terbentuk, P2MPP di Desa Klidang Lor melakukan sosialisasi termasuk kepada nelayan yang dilanjutkan pembentukan pokmas. Dari hasil kegiatan tersebut, akhirnya beberapa masyarakat memanfaatkan dana yang disediakan untuk mulai merintis usaha, yang sampai sekarang semakin besar.

Dalam program ini muncul pola utama yaitu sebelum proses pencairan dana pihak UPKu maupun Aparatur Desa harus membentuk pokmas sasaran terlebih dahulu. Setelah pokmas terbentuk UPKu dapat menyediakan peminjaman dana yang nantinya digunakan oleh Pokmas selaku peminjam dana untuk beberapa sektor usaha yang akan dilakukan oleh pokmas. Dalam proses peminjaman dana yang merupakan dana bergulir terdapat beberapa tahapan dan aturan peminjaman yang harus ditaati oleh pokmas/RTS agar nantinya dana tersebut tidak macet ditengah jalan dan dapat secara terus menerus bergulir (Utama, 2017). Pada masyarakat Klidang Lor sebelumnya

telah mengetahui bahwa jika proses peminjaman dana memang harus diawali dengan membentuk pokmas. Maka kemudian proses peminjaman dana dapat berjalan.

### **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Menuju Kesejahteraan**

Menurut Soegiarto pantai adalah tepi laut/pesisir perbatasan daratan dan laut / massa air lainnya dan bagian yang terpengaruh air laut tersebut. Daerah pasang-surut di pantai yaitu antara pasang tertinggi dan surut terendah landai. Sedangkan wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Diposaptono, 2003).

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Dalam melihat pemberdayaan dapat dipandang dari proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, serta setiap orang yang termasuk dalam kelompok miskin. Sedangkan dalam perspektif tujuan, maka pemberdayaan diarahkan pada

hasil yang ingin dicapai. Hasil tersebut meliputi masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan, serta dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. (Abidin, 2017). Merujuk pada konsep ini program P2MPP ini telah paling tidak menjadi kegiatan pemberdayaan di mana masyarakat Desa Klidang Lor dapat mulai usahanya dengan uluran tangan dana. Pada praktiknya memang tidak semua anggota dapat *survive*, tapi paling tidak program ini dapat memberikan penambahan pemasukan keluarga.

Dalam perspektif lain pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi masyarakat. Seluruh potensi yang dimiliki dimaksimalkan untuk menyelesaikan masalah. Proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat nelayan juga pernah dilakukan di Desa Karangagung. Program ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mengetahui kondisi desa dan masyarakat, melakukan riset partisipatif, merencanakan dan melakukan gerakan-gerakan aksi kolektif. Dari pola pemberdayaan menghasilkan perubahan yang bisa menjadi mendorong kemandirian masyarakat (Zakariya, 2020). Pemberdayaan pada nelayan tersebut telah dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan. Sebenarnya setiap masyarakat memiliki potensi masing-masing, termasuk masyarakat pesisir di Klidang Lor. Hal tersebut merupakan aset penting untuk dikembangkan. Sehingga P2MPP menjadi salah satu alternatif untuk menjawab itu. P2MPP hadir di sini karena potensi tersebut belum dilihat sebagai aset dan banyak masyarakat masih dianggap miskin.

Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Sutarto, 2018). Sebagaimana dijelaskan oleh Azizah, dkk Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Azizah & Jamil, 2021). Seperti diungkap sebelumnya, masyarakat nelayan Batang tidak semua dapat dikatakan miskin.



Mereka sebenarnya memiliki pendapatan yang tidak sedikit jika didasarkan pada UMP. Namun, sayangnya pendapatan itu tidak dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan.

Pada dasarnya, kemiskinan selalu menjadi “*trade mark*” bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang. Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural (Kristiyanti, 2016). Ketika merujuk pada konsep tersebut, kondisi nelayan Klidang Lor dapat tergolong dalam kemiskinan struktural. Dalam pengertian ini mereka terpaksa terjatoh oleh rutinitas kredit. Beberapa orang terpaksa menjaminkan sertifikat tanahnya untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu saat sebelum pergi melaut, biasanya juragan memberikan pinjaman awal (kasbon) yang nanti akan mengurangi pendapatan setelah kembali. Model perputaran uang yang demikian menjadikan kondisi mereka selalu tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Dengan segala kondisi tersebut, P2MPP hadir sebagai jalan tengah memberikan dorongan membuka usaha. Dalam hal tertentu dinamika anggota kelompok menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. Gerakan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu wujud dari beberapa gerakan kultural dan struktural dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. gerakan ini berpijak pada fakta dan kenyataan di masyarakat. Bahkan hal ini telah diawali oleh Bung Hatta sejak Indonesia merdeka (Sasono, 2008). Pada akhirnya sebuah kondisi yang bisa menjadi awal perubahan sosial di Desa Klidang Lor dapat terlaksana. Beberapa dari mereka tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari sektor laut. Meskipun belum terlalu signifikan, paling tidak hasil yang didapatkan telah membantuk ekonomi keluarga. Hal tersebut disebabkan karena pengelola belum begitu memiliki kemampuan yang maksimal, sehingga program P2MPP masih ditemukan kendala dan hambatan.



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya mensejahterakan masyarakat pesisir dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai di wilayah desa Klidang Lor, Kabupaten Batang telah mampu paling tidak memberikan bantuan modal kepada kelompok nelayan. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari laut. Namun secara kuantitatif keberhasilannya belum terlalu signifikan, maka masih perlu banyak diperbaiki dan dievaluasi untuk kebaikan kedepannya. Pengelolaan dari perencanaan, proses dan evaluasi perlu untuk dikembangkan lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122.
- Azizah, A. S., & Jamil, N. J. (2021). *Pemberdayaan Pengelolaan Daur Ulang Limbah Plastik Melalui Gerakan Pemuda Desa Tejosari Parakan Temanggung*. 3(1), 97–114. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.97-114>
- Diposaptono, S. (2003). Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dalam Kerangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia. *Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*, 8(2), 1–8.
- DKP. (2013). *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018*. Semarang: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- Harahap, R. H. (2015). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. Makalah pengukuhan Guru Besar bidang Ekologi Manusia*. Medan.
- IPB, F. (2002). *Pentingnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*. (2002), 1–54.
- KKP. (2002). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Retrieved December 20, 2021, from Kementerian Kelautan dan Perikanan website: [http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show\\_detail&id=2332&keywords=](http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=2332&keywords=)
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pebdekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, (180), 752–760.
- Kusnadi. (2008). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Bandung: Rosdakarya.

- Pregiwati, L. A. (2019). Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama. Retrieved December 20, 2021, from Kementerian Kelautan dan Perikanan website: <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>
- Sasono, A. (2008). *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Sofyan, M. A. (2016). *Struktur Dan Kultur Pembangkangan Komunal: Kasus Pelarangan Kapal Cantrang Di Perairan Jawa Utara*. Univesritas Gadjah Mada.
- Sutarto, D. (2018). **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER** Dendi Sutarto Abstrak penyangga utama perekonomian masyarakat yaitu sebagai karyawan perusahaan , sedangkan pembangunan masyarakat Batam dan wilayah pesisir tidak berljajan dengan baik , b. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 131–148.
- Utama, O. P. (2017). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)*. Universitas Jember.
- Zakariya, A. F. (2020). Pemberdayaan Nelayan dalam Mambangun KekuatanEkonomi MelaluiPengolahan Ikan Di Desa Karangagung. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 133–150.